

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru adalah seorang ujung tombak pelaksana pendidikan. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai tugas, fungsi dan kedudukannya sangat sentral dan strategis dalam penciptaan insan Indonesia cerdas, kompetitif dan komprehensif. Oleh karena itu pengembangan guru sebagai profesi memerlukan suatu system pembinaan dan pengembangan profesi guru secara terprogram dan berkelanjutan. Artinya, pengembangan profesi dan karir guru sangat penting dan diperlukan untuk mendukung terwujudnya guru yang professional.

Guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesi yang bermartabat dan profesional. Guru profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹ Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa kompetensi yang beragam memiliki kualifikasi dan kompetensi yang beranekagam, sehingga berdampak pada kurang optimalnya kinerja yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, secara umum guru harus memiliki 4 kompetensi, yaitu *kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional*.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I pasal 1 butir 4. Yakni profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan

¹ UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, hlm. 7

² Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang *Standar Pendidikan Nasional*, hlm. 12.

kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Seorang guru dapat dikatakan profesional jika ia memenuhi prinsip-prinsip profesionalitas sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia
3. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.³

Peningkatan profesionalitas guru penting dilakukan mengingat pendidikan merupakan salah satu sarana terpenting dalam usaha pembangunan sumber daya manusia dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan yang pada gilirannya akan menciptakan suasana dan tatanan kehidupan masyarakat yang beradab dan berperadaban.⁴

Selain itu, kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh oleh mutu sumber daya manusia masyarakat tersebut. Mutu sumber daya manusia tergantung pada tingkat pendidikan masing-masing individu pembentuk bangsa. Pendidikan yang visioner, memiliki misi yang jelas akan menghasilkan

³ Haryadi, Rahmad, *Budaya Organisasi Sekolah Berprestasi*, STAIN Salatiga Press, Salatiga, 2006, hlm. 24.

⁴ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam*, Syed M. Naquib Al-Attas, terj. Hamid Fahmi Zarkasyi, dkk, Bandung:Mizan, 200, hlm.23

keluaran yang bermutu. Dari sanalah pentingnya manajemen dalam pendidikan diterapkan.⁵

Pengembangan sumberdaya manusia pendidik, khususnya pengembangan profesional guru merupakan usaha mempersiapkan guru agar memiliki berbagai wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan memberikan rasa percaya diri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai petugas profesional. Pengembangan atau peningkatan kemampuan profesional harus bertolak pada kebutuhan atau permasalahan nyata yang dihadapi oleh guru, agar bermakna.⁶ Kenyataan yang ditemui di lapangan para guru masih mendapatkan kesulitan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang profesional. Kesulitan yang dihadapi diantaranya adalah dalam mengembangkan silabus, menyusun perencanaan pembelajaran, dan evaluasi belajar. Salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia pendidik.

Dalam rangka peningkatan profesionalitas guru tersebut pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dulu bernama Kementerian Pendidikan Nasional) mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dengan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)⁷. Sebagaimana Tinjauan Yuridis tentang pembentukan MGMP ini antara lain adalah: a) UU NO.2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 31 Ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa, b) Keputusan Menpan No. 26/Menpan/1989 Tanggal 2 Mei 1989 Tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan c) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1989 Tentang Tenaga Kependidikan

⁵ Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*; dari Teori ke Praktik, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 58.

⁶ Kemdiknas, *Rambu-Rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP*, Jakarta: Dirjen PMPTK, 2010.hlm.1

⁷ *Tinjauan Yuridis tentang pembentukan MGMP*, UU NO.2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 31 Ayat 4

Bab XIII Pasal 61 Ayat 1 yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan kewenangan, profesional, martabat, dan tujuan kesejahteraan tenaga kependidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Di samping itu, sejak diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mempersyaratkan guru untuk: (a) memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4, (b) memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan (c) memiliki sertifikat pendidik. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut diharapkan memberikan suatu kesempatan yang tepat bagi guru untuk meningkatkan profesionalitasnya melalui pelatihan, penulisan karya ilmiah dan pertemuan di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

MGMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di tingkat sanggar ataupun di tiap-tiap sekolah yang terdiri dari dua unsur pokok yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Musyawarah yang dimaksud di sini adalah mencerminkan kegiatan dari, oleh dan untuk guru. Adapun guru mata pelajaran adalah guru SMP atau SMA Negeri atau Swasta yang mengasuh dan bertanggungjawab untuk mengelola mata pelajaran tertentu yang ditetapkan dalam kurikulum.

Dengan demikian, kehadiran MGMP sebagai wadah kegiatan profesional guru diharapkan dapat menyamakan visi dan persepsi dalam menentukan sikap dan tindakan terhadap aneka masalah tersebut sehingga dapat diambil solusi yang tepat, efektif dan efisien (Surat Edaran Bersama Dirjen Dikdasmen dan Dirjen Binbaga Islam No.781/A/C/U/1993 dan No.1/01/ED/1444/1993, tentang Pedoman Pelaksanaan MGMP PAI pada SMP dan SMU/SMK).

MGMP diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis dalam mengelola mata pelajaran yang menjadi tanggungjawabnya, terampil dan bijaksana dalam mengadaptasi setiap dinamika perubahan masyarakat atau perubahan kebijakan pendidikan sehingga benar-benar menjadi guru yang profesional.

Peranan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pendidikan agama islam dalam pengembangan program pendidikan di madrasah sangat penting karena lembaga ini merupakan wadah kegiatan profesional guru PAI dalam meningkatkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan. Selain itu, melalui kegiatan ini dapat dilakukan diskusi, tukar pikiran dan pengalaman antara pengurus MGMP PAI untuk mengatasi permasalahan yang ada dan berkembang di madrasah.

Banyak kegiatan profesionalitas guru yang dapat dibicarakan dalam forum ini, misalnya kegiatan pembuatan kurikulum, tingkat satuan pendidikan (KTSP). Seperti diketahui pemerintah mengeluarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan, setelah melalui uji coba, mulai 2006 sudah diberlakukan berdasar PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 17 kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi, karakteristik daerah, social budaya masyarakat, dan karakteristik peserta didik.

Guru berada di posisi terdepan dalam dunia Pendidikan, guru diberi tugas untuk mengembangkan standar nasional pendidikan (SNP). Pengalaman yang selama ini bergulat dengan anak didik menjadi modal utama dalam mengimplementasikan pengembangan kurikulum tersebut.⁸ Oleh karena itu keberadaan MGMP sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan guru.

Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU sebagai salah satu departementasi pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama (NU) bidang pendidikan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan, mengelola, dan membina lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal selain pondok pesantren yang berhaluan Ahli sunnah waljamaah. Tugas LP Ma'arif NU yaitu mengelola dan membina berbagai jenis dan jenjang lembaga pendidikan NU, antara lain: TK/RA, TPQ, Diniyah, MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA, MAK/SMK, lembaga kursus/pelatihan dan perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi dan

⁸ Hasbi Indra, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Implementasi Kurikulum Standar Nasional", *www.Diptais Online.net*, 2008, hlm.1

tugasnya, LP Ma'arif NU banyak menghadapi problematika baik dari intern lembaga, antar lembaga NU maupun ekstern lembaga, sehingga dalam banyak hal, lembaga-lembaga pendidikan binaan LP Ma'arif seringkali ketinggalan dibanding dengan sekolah-sekolah yang dibina oleh lembaga lain, misalnya Muhammadiyah, Korseyu, Yayasan 17 Agustus dan sebagainya. Dengan lahirnya berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, termasuk otonomi daerah, desentralisasi pendidikan dan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), nampaknya memberikan kesempatan yang lebih luas khususnya bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta termasuk LP Ma'arif NU untuk mengembangkan diri secara optimal. Salah satu media untuk mengembangkan profesionalitas guru, maka dibentuklah forum Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP)

MGMP yang dibentuk oleh LP. Ma'arif telah memiliki kelompok guru mata pelajaran pada tingkat gugus madrasah, para guru juga tergabung dalam MGMP tingkat kabupaten, pada tiap mata pelajaran termasuk mata pelajaran Al-Qur'an Hadits. Menurut keterangan Pembina MGMP Al-Qur'an Hadits, MGMP Al-Qur'an Hadits Madrasah Aliyah se Kabupaten Demak merupakan MGMP yang tergolong aktif dalam menjalankan kegiatan dan pertemuan rutin.

LP. Ma'arif berharap forum MGMP menjadi sarana bagi segenap guru-guru di tingkat Madrasah aliyah Ma'arif se Kabupaten Demak sesuai mapelnya masing-masing untuk mengembangkan potensi diri, keterampilan dan kreativitasnya, serta menjadi media untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengajaran dan pembelajaran. Hal tersebut menurutnya sesuai dengan salah satu tujuan awal diadakannya MGMP, yaitu meningkatkan profesionalitas guru peserta MGMP sehingga dapat menghasilkan output yang baik pula bagi prestasi peserta didik. yang pada akhirnya bisa menjadi sumbangsih bagi kemajuan bangsa Indonesia

Terkait dengan permasalahan manajerial inilah, peneliti tertarik untuk meneliti MGMP mata pelajaran Al-Qur'an Hadits tingkat Madrasah Aliyah di lingkungan lembaga pendidikan Ma'ari Demak. Beberapa masalah yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian di sini di antaranya karena

lemahnya koordinasi di antara sesama pengurus MGMP sehingga kepengurusan menjadi kurang solid, kurang terprogramnya kegiatan seolah tidak memiliki perencanaan yang baik sehingga tidak dirasakan adanya frekuensi kegiatan rutin, kurang pekannya pengurus terhadap isu-isu baru kependidikan, rendahnya partisipasi guru anggota MGMP terlibat dalam kegiatan musyawarah yang berkelanjutan. Hal inilah yang kemudian menjadi suatu pijakan semakin tertarik untuk meneliti. Namun dengan beberapa alasan, peneliti lebih memfokuskan penelitian ini pada lembaga pendidikan Ma'arif, khususnya Mata pelajaran Al-Qur'an Hadits.

Alasan lain, kenapa peneliti menentukan Madrasah aliyah di bawah naungan lembaga pendidikan Ma'arif, ialah sebagaimana data dari kantor kementerian agama Kabupaten Demak seksi Pendidikan madrasah menunjukkan bahwa sebanyak 52 Madrasah aliyah yang terdaftar di Kemenag Kabupaten Demak, terdiri 1 madrasah aliyah negeri, 2 diantaranya dibawah naungan lembaga pendidikan Muhammadiyah, 31 bernaung di bawah LP. Ma'arif, selebihnya sebanyak 18 bersifat mandiri.⁹ Dengan jumlah obyek lebih banyak tentunya akan menghasilkan data yang lebih kompleks juga.

DAFTAR MADRASAH TINGKAT ALIYAH SE KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA MADRSAH	STATUS	AFILIASI
1	MA Tarbiyatul Mubtadiin	Swasta	LP. Ma'arif
2	MAN DEMAK	Negeri	Diknas
3	MA AL FATTAH	Swasta	LP. Ma'arif
4	MA AL Ghozali	Swasta	LP. Ma'arif
5	MA AL IKHWAN	Swasta	LP. Ma'arif
6	MA AL Irsyad Gajah	Swasta	LP. Ma'arif
7	MA AL Ittihad	Swasta	LP. Ma'arif
8	MA AL-Hadi	Swasta	-
9	MA AL-Khoiriyyah	Swasta	LP. Ma'arif

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Juair Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kemenag Kabupaten Demak, tanggal 18 Agustus 2017

10	MA AL-Ma'ruf	Swasta	LP. Ma'arif
11	MA AN-Nur BAKALREJO	Swasta	LP. Ma'arif
12	MA Anwarul QUR`AN	Swasta	LP. Ma'arif
13	MA Asy-Syarifah	Swasta	-
14	MA Darul Ulum Sayung	Swasta	LP. Ma'arif
15	MA Darussalam wedung	Swasta	LP. Ma'arif
16	MA Fathul Huda Sayung	Swasta	-
17	MA Futuhiyyah 1	Swasta	LP. Ma'arif
18	MA Futuhiyyah 2	Swasta	LP. Ma'arif
19	MA Hidayatul Muftadi`IN	Swasta	LP. Ma'arif
20	MA Ibrohimiyyah	Swasta	LP. Ma'arif
21	MA I Anatuth Thullab	Swasta	LP. Ma'arif
22	MA Manbaul Huda	Swasta	-
23	MA Matholi`ul Falah	Swasta	LP. Ma'arif
24	MA Mazroatul Huda	Swasta	LP. Ma'arif
25	MA Miftahul Huda	Swasta	LP. Ma'arif
26	MA Miftahul Ulum	Swasta	-
27	MA Miftahussalam	Swasta	LP. Ma'arif
28	MA Miftakhul Huda	Swasta	LP. Ma'arif
29	MA Nahdlatusy Syubban	Swasta	LP. Ma'arif
30	MA NU 3 Ittihad Bahari	Swasta	LP. Ma'arif
31	MA NU Sabilul Muttaqin	Swasta	LP. Ma'arif
32	MA Nurul Huda	Swasta	-
33	MA Nurul Ittihad	Swasta	LP. Ma'arif
34	MA Rohmahiyah	Swasta	LP. Ma'arif
35	MA Sholahuddin	Swasta	LP. Ma'arif
36	MA Sunan Kalijaga	Swasta	LP. Ma'arif
37	MA Takhasus AL Qur`AN	Swasta	-

38	MA Taqwiyatul Wathon	Swasta	-
39	MA Yasu`A Pilangwetan	Swasta	LP. Ma'arif
40	MA YPKM Raden Fatah	Swasta	-
41	MA Islam An-Nidhom	Swasta	LP. Ma'arif
42	MA NU 2	Swasta	LP. Ma'arif
43	MA Tasywiqul Wathon	Swasta	LP. Ma'arif
44	MA Taqwiyatul Wathan	Swasta	LP. Ma'arif
45	MA An Nur	Swasta	LP. Ma'arif
46	SMA Muhammadiyah 1	Swasta	Muhammadiyah
47	SMA Muhammadiyah 2	Swasta	Muhammadiyah
48	MA Raudlatul Muallmin	Swasta	LP. Ma'arif
49	MA Ribhul Ulum	Swasta	LP. Ma'arif
50	MA Nurul Ulum	Swasta	LP. Ma'arif
51	MA Al Fattah	Swasta	LP. Ma'arif
52	MA Al Falah	Swasta	LP. Ma'arif

Tabel 1.1

Dengan latar belakang dan alasan pemilihan judul di atas, maka peneliti merumuskan tesis yang akan diteliti dengan judul *“Peran Manajemen MGMP Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Madrasah Aliyah Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Di Lembaga Pendidikan Ma’arif Demak”*

B. Fokus Penelitian

Peran Manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Madrasah Aliyah Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Lembaga Pendidikan Ma’arif Demak

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sub bab sentral yang menjadi intisari dalam sebuah karya ilmiah. Di dalamnya tersurat bahan kajian pokok yang melingkupi seluruh isi karya yang bersangkutan. Agar masalah dapat terjawab secara akurat, maka masalah yang akan diteliti perlu dirumuskan secara spesifik.¹⁰ Ikhtisar inti penelitian bisa dilihat dari permasalahan apa yang diangkat peneliti dalam membedah tema besar yang mereka angkat.

Bertolak dari uraian dan permasalahan tersebut di atas, penelitian ini difokuskan dalam tiga topik permasalahan, yang dapat diasumsikan sebagai problem akademik dan kemudian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen MGMP dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru Al-Qur'an Hadits di LP. Ma'arif Demak?
2. Bagaimana penyelenggaraan MGMP pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits MA di LP. Ma'arif Demak?
3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam MGMP Mata pelajaran Al-Qur'an Hadits MA di LP. Ma'arif Demak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu permasalahan dalam penelitian pada hakikatnya mempermudah peneliti dalam memetakan akan penelitian ke depan. Poin apa yang menjadi maksud penelitian; akan dibawa ke mana penelitian pada langkah ke depannya. Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan yang diketengahkan sehingga rencana peneliti dalam memecahkan masalahnya menjadi *goal* yang hendak dicapai dari penelitian yang dimaksud.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manajemen MGMP dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru Al-Qur'an Hadits di LP. Ma'arif Demak.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Penerbit Alfabeta: Bandung, 2012, hal. 396

2. Untuk mengetahui penyelenggaraan MGMP mata pelajaran Al-Qur'an Hadits MA di LP. Ma'arif Demak.
3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam MGMP Mata pelajaran Al-Qur'an Hadits MA di LP. Ma'arif Demak.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat (nilai guna dasar) besar, yaitu makna secara teoritis dan makna secara praktis. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan bagi upaya pengembangan ilmu pendidikan, khususnya pada bidang pengembangan manajemen administrasi pendidikan. Data yang diperoleh akan semakin memperkaya kajian teoritis terhadap pengembangan manajemen Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dalam pendidikan dan bahkan kalau mungkin akan semakin mengundang perhatian dan pemikiran untuk menggali bagaimana seharusnya pengembangan manajemen Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dalam pendidikan yang baik guna mewujudkan tujuan pendidikan Islam.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis-akademis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya dan mengembangkan keilmuan manajemen pendidikan Islam mengenai peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam meningkatkan Profesionalisme guru Mata Pelajaran Qur'an Hadits Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Demak. selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan studi lanjutan yang relevan dan sebagai bahan kajian tentang upaya peningkatan sumber daya manusia seorang guru secara umum

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini memberikan makna pada beberapa kalangan, sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Pendidikan Ma'arif,

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang menjadi naungan lembaga, karena lembaga

Ma'arif sangat menentukan kualitas dan mutu pendidikan. Untuk itu lembaga pendidikan Ma'arif dapat memberikan pembinaan dan pelatihan dalam meningkatkan profesionalisme seorang guru.

2. Bagi Kementrian Agama

Hasil Penelitian ini dapat meningkatkan bentuk perhatian akan keberlangsungan kegiatan MGMP sehingga dinas terkait (Kementrian Agama) akan lebih peduli dan berupaya untuk memberikan fasilitas dalam rangka memajukan MGMP demi peningkatan profesionalisme guru.

3. Bagi Pengurus MGMP

Pengurus MGMP dapat menggunakan hasil penulisan ini sebagai bahan rujukan dalam menyusun strategi pengelolaan kegiatan MGMP yang ideal pada periode berikutnya.

4. Bagi Guru

Tersedianya peluang untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, jenjang karir sebagai pendidik dan tenaga kependidikan melalui berbagai kegiatan kelompok kerja sehingga mampu melaksanakan pembelajaran dan tugas kependidikan secara profesional. Selain itu diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam pengembangan penelitian tindakan kelas dan menumbuhkan budaya meneliti agar terjadi inovasi pembelajaran

F. Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 Bab, dan masing-masing bab memuat sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal.

Pada bagian ini terdiri dari: Halaman Judul, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Persembahan, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi, Halaman Daftar Tabel, Pedoman Transliterasi, Abstrak.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat lima bab terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN yang akan membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II : LANDASAN TEORI, Pertama, Manajemen meliputi: Pengertian Manajemen, Prinsip Manajemen, Unsur Manajemen. Kedua, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) meliputi: Pengertian Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Unsur Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Fungsi dan Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Standar Pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Ketiga, Profesional Guru meliputi: Pengertian Profesional Guru, Bentuk Profesional Guru, Fungsi Profesional Guru. Keempat, Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits meliputi: Pengertian dan Tujuan Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits, Ruang Lingkup Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits. Kelima, Kajian Penelitian Terdahulu. Keenam, Kerangka Berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN meliputi: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Pemilihan Informan, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN meliputi: Pertama, Hasil Penelitian meliputi: Gambaran Umum, Data Penelitian. Kedua, Analisis Data meliputi: Analisis Konsep Manajemen MGMP dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru Al-Qur'an Hadits di LP. Ma'arif Demak. Analisis Penyelenggaraan MGMP Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits MA di LP. Ma'arif Demak. Analisis Faktor yang menjadi Penghambat dan Pendukung dalam MGMP Mata pelajaran Al-Qur'an Hadits MA di LP. Ma'arif Demak.

BAB V : PENUTUP meliputi: Kesimpulan, dan Saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat tentang Daftar Pustaka, Daftar Riwayat Hidup, Lampiran-Lampiran.

